

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan dan sudah peneliti bahas dalam bab sebelumnya. Bahwasannya konflik dalam pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi Tahun 2022 akan tetap berlanjut apabila tidak ditangani dengan baik sehingga pemetaaan konflik menurut Abdallah yang peneliti gunakan dapat menjelaskan dan juga menganalisis mengenai sumber konflik hingga dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat.

Konflik pembangunan kanopi ini bersumber dari tidak sepemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau bisa dikatakan konflik ini terjadi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari ketidakcocokan pemahaman antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan masyarakat bahkan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan DPRD. Kepentingan dari tiap-tiap pihak sangat bermacam-macam. Kepentingan dari Pemerintah Daerah sendiri ialah agar tetap terlaksananya pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau dan juga ingin melestarikan Jalan Minangkabau di Kota Bukittinggi dan ingin menertibkan pedagang kaki lima. Jika dilihat dari kepentingan Serikat Jalan Minangkabau ialah untuk memberhentikan dan menolak pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau ini terlaksana. Sedangkan kepentingan dari Niniak Mamak ialah hampir sama dengan pemerintah daerah yakni ingin melestarikan Jalan Minangkabau namun tidak dengan membangun

kanopi di Jalan Minangkabau, karena kanopi tersebut dapat mengganggu prosesi adat Kurai.

Posisi dari pihak-pihak yang terlibat terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu posisi pro atau posisi menyetujui mengenai program pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau, yang kedua posisi kontra yakni posisi yang tidak menyetujui program pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau, dan yang terakhir ialah posisi netral yakni posisi yang tidak memihak antara dua kubu. Dalam hal ini pihak-pihak dalam posisi pro ialah Pemerintah Kota Bukittinggi yakni Walikota Bukittinggi Erman Safar, Sekretaris Daerah Martias Wanto, Dinas PUPR Edi Patrawijaya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Wahyu Bestari dan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan pada posisi kontra terdapat Serikat Jalan Minangkabau, Niniak Mamak Jorong 5 Kurai, dan posisi netral terdapat Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi dan DPRD.

Pihak yang terlibat dalam konflik ini ialah pihak primer yakni Pemerintah Daerah beserta SKPD, Serikat Jalan Minangkabau, pedagang kaki lima, niniak mamak kurai dan kontraktor dan untuk pihak terisier ialah wakil walikota bukittinggi. Posisi pihak dalam konflik ini ialah pro: Pemerintah Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Pedagang Kaki Lima, dan Kontraktor. Posisi kontra: Serikat Jalan Minangkabau, Niniak Mamak Kurai, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan posisi netral: Wakil Walikota Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk sikap-sikap yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat lebih dominan bersikap positif, karena sikap yang dilakukan oleh pihak yang terlibat

tidak ada yang melanggar norma. Namun berbeda dengan sikap yang dilakukan oleh pihak kontraktor, yang mana pihak kontraktor mengeluarkan kata-kata “*aden*” dan “*ka ang tumbuak den*” yang mana sikap-sikap tersebut merupakan sikap negatif dan dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik.

Perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat cukup beragam. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang berasal dari pihak-pihak itu sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Selain itu dalam konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau ini tidak terdapat pihak-pihak lain yang ikut campur dalam permasalahan ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau ini memang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Untuk hasil akhir yang dirasakan oleh setiap pihak cukup beragam namun lebih dominan berdampak negatif dibandingkan dampak positif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan yang sudah peneliti dapatkan di lapangan terkait pemetaan konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi, terdapat beberapa saran dari peneliti baik itu secara akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti mengenai bagaimana pentingnya keputusan dari Niniak Mamak Kurai di Pemerintahan Kota Bukittinggi
2. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemetaan konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau, diharapkan untuk

peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai resolusi konflik dalam pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai kepentingan dari tiap-tiap pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pemerintah terkait dalam membuat suatu program pembangunan agar program tersebut dapat menguntungkan semua pihak dan tidak terjadi konflik, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal.
5. Dalam konteks penataan kota pihak pemerintah sebaiknya memperbaiki komunikasi dan menerima aspirasi dari semua pihak, baik itu dari pihak Pedagang Kaki Lima, pihak Serikat Jalan Minangkabau, dan pihak Niniak Mamak Kurai.
6. Dalam menata Kota Bukittinggi, pemerintah sebaiknya mengatur strategi pada saat pembangunan sedang berlangsung, seperti pengerjaan pembangunan dilaksanakan pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas para pedagang dan pejalan kaki.
7. Dalam menata pedagang kaki lima di Jalan Minangkabau, pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Minangkabau. Kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.